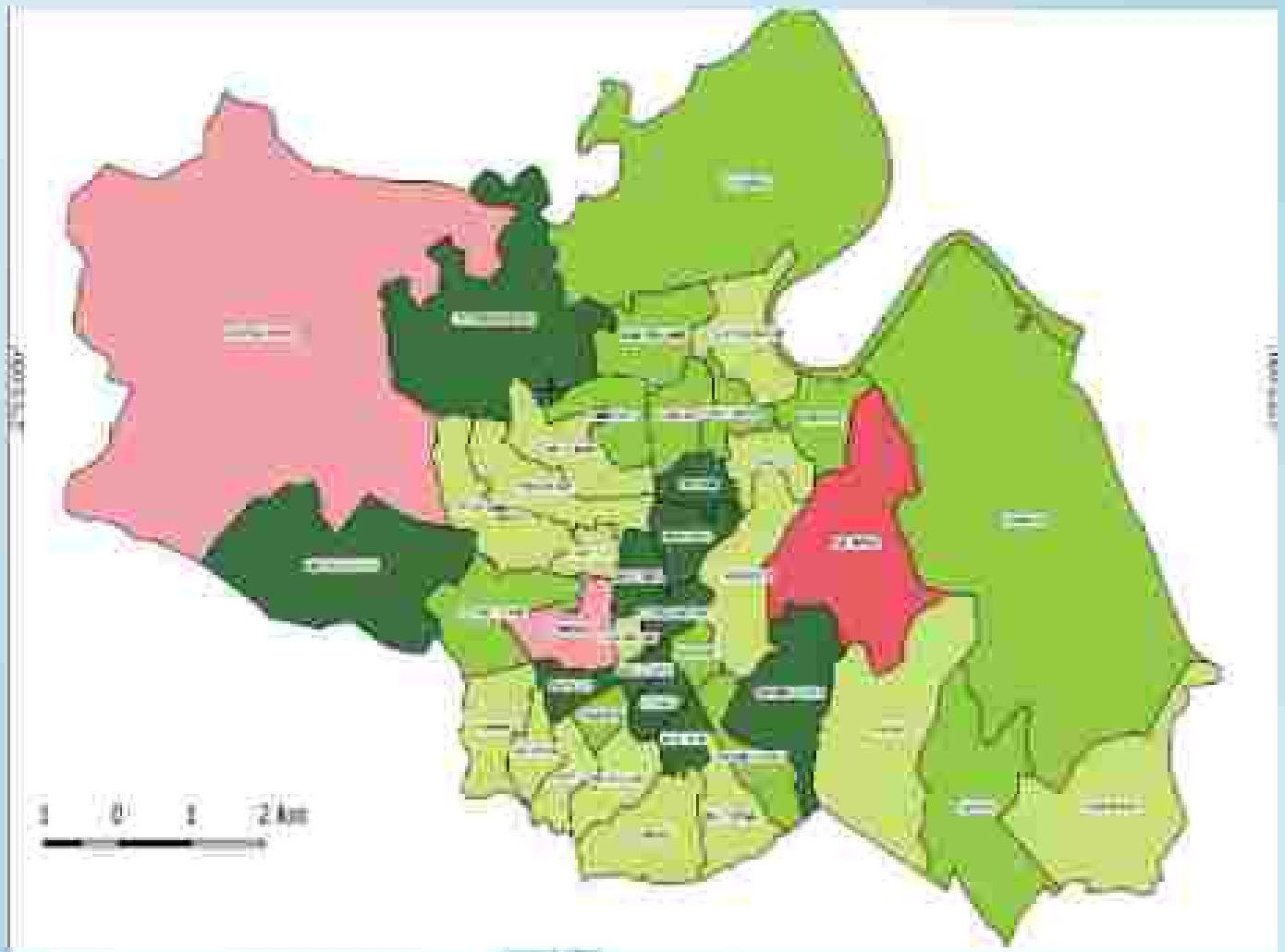


**PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS)**

**FSVA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

**Jl. Jend. Sudirman, Selindung Baru,
Kec. Gabek, Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya dalam mengiringi segenap langkah dan aktifitas kita menunaikan amanah dan tanggung jawab kelembagaan sehingga kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) ini merupakan implementasi dari rencana kerja dalam Satuan Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022.

Kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) bertujuan menyediakan data/informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, sebagai instrumen untuk memonitoring ketahanan pangan di Kota Pangkalpinang.

Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalpinang, Desember 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG



MAULAN AKLIL

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	6
1.3. Metodologi	11
2. KETERSEDIAAN PANGAN	18
2.1. Latar Pertanian	18
2.3. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	19
2.4. Strategi Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan	20
3. AKSES TERHADAP PANGAN	22
3.1. Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	22
3.2. Akses Transportasi	23
3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan	25
4. PEMANFAATAN PANGAN	26
4.1. Akses Terhadap Akses Air Bersih	26
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	27
4.3. Dampak Dari Status Kesehatan	28
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	30
5. KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	35
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	35
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	39
6. REKOMENDASI KEBUJAKAN	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data Indikator Kerentanan terhadap Kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan Indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) ketervakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk, dan (2) Kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih, dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 5 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

- E. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa Kelurahan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 3 kelurahan dari 42 kelurahan (7.14 %) yang terdiri dari 1 kelurahan (2.38%) Prioritas 2; 2 kelurahan (4.76%) Prioritas 3. Kelurahan prioritas 2 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Bukit Intan. Kelurahan prioritas 3 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Taman Sari; 1 kelurahan di kecamatan Gerunggang.
7. Karakteristik kelurahan rentan pangan ditandai dengan (1) Sarana Prasarana Penyedia Pangan, (2) Air bersih, dan (3) Jumlah tenaga kesehatan.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dalam menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
- a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit); dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan.

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1.1. Luas Wilayah dan Persentase Luas Kota Dirinci Per Kecamatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2018	3
1.2. Indikator FSVA Kota 2022	12
1.3. Bobot Indikator Individu	15
2.1. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas	19
3.1. Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	23
4.1. Sebaran Kelurahan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	27
4.2. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas	28
4.3. Penderita Stunting Tahun 2021 dan 2022	29
5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	8
Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 2 Per Kecamatan	36
Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 3 Per Kecamatan	37
Gambar 5.3 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 4 Per Kecamatan	37
Gambar 5.4 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 5 Per Kecamatan	38
Gambar 5.5 Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 6 Per Kecamatan	38
Gambar 6.1 Kerangka Intervensi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN TAHUN 2022

Lampiran 2. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH PENDUDUK TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH TAHUN 2022

Lampiran 3. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO TANPA AKSES PENGHUBUNG MEMADAI TAHUN 2022

Lampiran 4. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN SUMBER AIR TIDAK TERLINDUNGI TAHUN 2022

Lampiran 5. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

Lampiran 6. PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO SKOR KOMPOSIT TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan dengan total penduduk sebesar 238.569 jiwa (BPS). Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonomi yang terletak di Pulau Bangka. Daerah ini berada pada garis 105° 4' sampai dengan 105° 7' Bujur Timur dan garis 2° 4' sampai dengan 2° 10' Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 105,67 km². Daerah ini terletak pada bagian timur Pulau Bangka dengan batas-batas sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka



Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:

1. Pusat pemerintahan dan pemukiman penduduk
2. Pusat perdagangan dan industri
3. Pusat pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan jasa
4. Pusat administrasi penambangan timah
5. Pusat lembaga keuangan

Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat sehingga untuk mengatasi kebutuhan akan tanah perkotaan, wilayah seluas 31,70 km² telah dikembangkan menjadi 89,40 km². Dan pada akhir tahun 2007 telah berkembang menjadi 118,41 km². Berdasarkan Renda Kota Pangkalpinang No. 02

Tahun 2011 tentang pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, jumlah kecamatan di Kota Pangkalpinang berjumlah 7 kecamatan yaitu Rangkul, Bukit Intan, Girimaya, Pangkalbalam, Gabek, Tamansari dan Gerunggung. Dua kecamatan yang baru yaitu Girimaya dan Gabek. Sedangkan jumlah kelurahan menjadi 42 Kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kota Dirinci Per Kecamatan di Kota Pangkalpinang, Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kota (%)
(1)	(2)	(3)
1. Rangkul	5,02	4,81
2. Bukit Intan	3,66	34,35
3. Girimaya	4,74	4,54
4. Pangkalbalam	4,68	4,48
5. Gabek	20,21	19,36
6. Tamansari	3,18	3,04
7. Gerunggung	39,93	29,62
2018	118,41	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang 2018

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan

Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75

mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap kehidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber kehidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2 KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamandatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6 penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation (FAO)* dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh

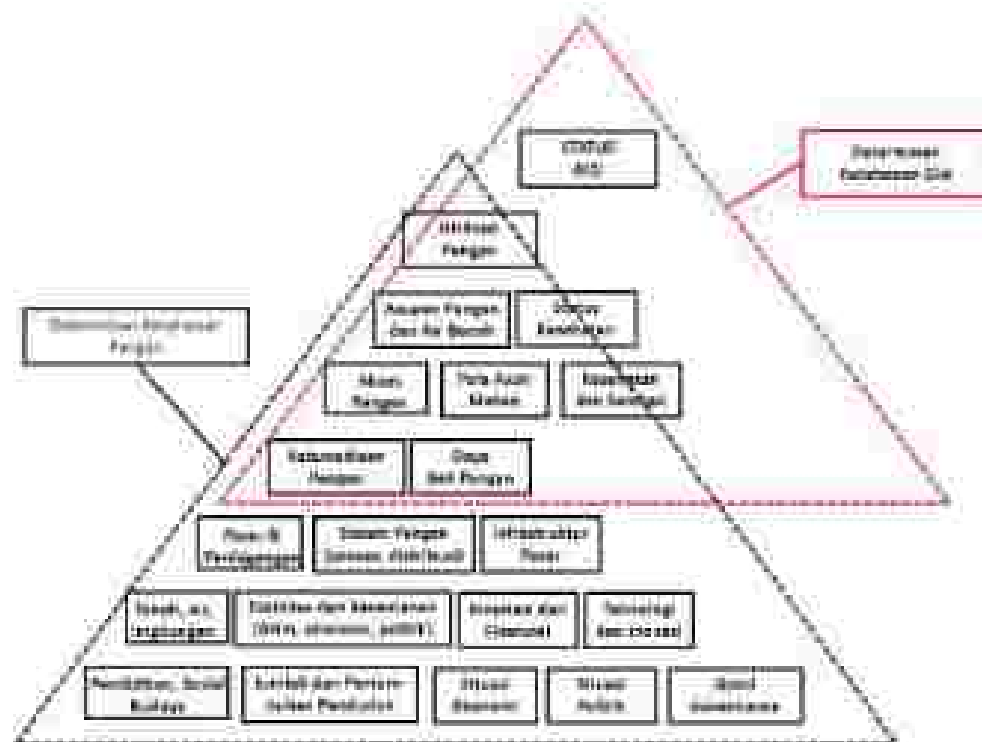
Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO² mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya Standing Committee on Nutrition (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013³ juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan hygiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

1.1

¹Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th session of 15-21 October 2012, Rome-Italia

²Dianampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 24-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi

kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat diitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pemberian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki

kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, akses kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebihmempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset: rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proxy ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebut dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya, (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi, dan (iv) ketersediaan data pada seluruh daerah.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	BPS, Pusat Data Informasi Kementan 2020
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2020, BPS Jumlah Rumah Tangga 2020 dari Sensus Penduduk (SP) 2020
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah Penduduk Desa dari SP 2020

Indikator	Definisi	Sumber Data
Desa yang tidak memiliki akses penghubung mamadal melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung mamadal dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara, namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2020; BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desa: 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2020; BPS Jumlah penduduk dari SP 2020

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategori mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relative indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)* dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to score* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y_j = \sum_{i=1}^p a_i X_{ij} \quad (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke- j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke- j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air, udara	1/6	1/6

Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa.	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{i=1}^n a_i C_{ij} \quad (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-j

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-i kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna beragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok, warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyisipkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kelangkaan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat

ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan². Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

2.2. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut.

Dari 42 desa di Kota Pangkalpinang, 10 desa masuk dalam prioritas 1 (23,8%), 5 desa prioritas 2 (11,9%) dan 9 desa prioritas 3 (21,4%).

Tabel 2.3 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Prioritas 1	0,0296	10	23,8%
2	Prioritas 2	0,0338	5	11,9%
3	Prioritas 3	0,0553	9	21,4%
4	Prioritas 4	0,0726	5	11,9%
5	Prioritas 5	0,0969	5	11,9%
6	Prioritas 6		8	19,04%



Grafik Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan

2.4. Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2018-2023 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

(i) Peningkatan produktivitas

- a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
- b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
- c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
- d. Pengelolaan air
- e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

(ii) Perluasan lahan sawah

- a. Pengembangan lahan sawah
- b. Optimalisasi penggunaan lahan
- c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
- d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung

(iii) Pengurangan dampak iklim terkait risiko

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani

- a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
- b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
- c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- d. Pemasaran produk pertanian, misal TTI, dll

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan PSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadamai melalui darat, air atau udara.

3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pada tingkat kelurahan berdasarkan data Data Tingkat Kesejahteraan Rendah tahun 2021, terdapat 1 (satu) kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah 2,38% (Prioritas 2) dan sebanyak 5 kelurahan (11,9%) masuk prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 6 (enam) kelurahan tersebut.

Tabel 3.1 Sebaran Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	0	0
2	1	3,38%
3	5	11,9%
4	33	78,5%
5	3	7,14%
6	0	0

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini makin kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah, investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di

daerah pedesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melawati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2020, EPS di Kota Pangkalpinang hampir semua kelurahan memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kota Pangkalpinang semua kecamatan sudah dapat dilalui dengan baik.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018 - 2023 diantaranya:

- Menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan memiliki hidup layak dalam kesehariannya.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Upaya percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan untuk menekan angka kemiskinan tidak semakin naik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan terutama kepada para pelaku sektor informal.

BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desa 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran kelurahan berdasarkan jumlah tangga tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	4	9,5%
2	0	0
3	1	2,38%
4	0	0
5	37	88%
6	0	0

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 3.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	5	11,9%
2	0	0
3	3	7,14%
4	6	14,28%
5	6	14,28%
6	22	52,38%

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

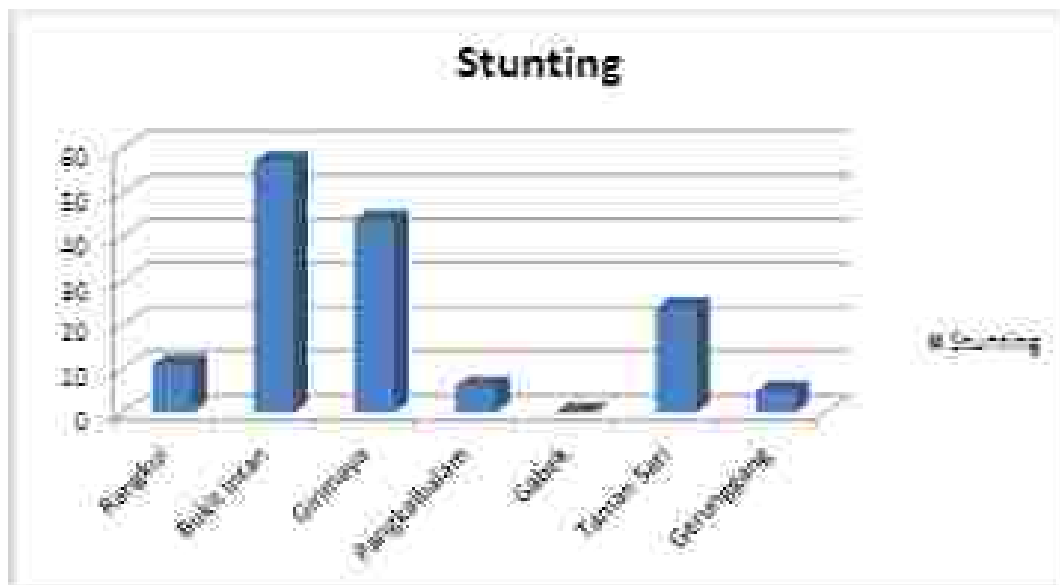
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak bisa diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore ≤ -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita stunting di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 sebanyak 147 balita. Jumlah penderita stunting yang tinggi ditemukan di Kecamatan Bukit Intan (57 balita) dan Kecamatan Girimaya (44 balita), Kecamatan Taman Sari (24 balita), Kecamatan Rangkui (11 balita), Kecamatan Pangkalbalan (5 balita), Kecamatan Gerunggung (5 balita) dan terendah ditemukan di Kecamatan Gabek (0 balita).

Tabel 4.2 Penderita Stunting 2021

No.	Kecamatan	Penderita Stunting	
		2021	2022
1	Rangkui	11	
2	Bukit Intan	57	
3	Girimaya	44	
4	Pangkal Balan	5	
5	Gabek	0	
6	Taman Sari	24	
7	Gerunggung	5	
	Total	147	



Gambar 4.2 Grafik Penderita Stunting

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi kronis (*stunting*) masih tetap tinggi di Kota Pangkalpinang, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat

badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kecacing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "jendela peluang (*window of opportunity*)" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan risiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di

berusia dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewan), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multi-sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan).
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan; makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi

- atau menggunakan suplemen gizi mikro tabur (sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurang-kurangnya 4 kali selama periode kehamilan;
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan; inisiasi menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama; melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara menimbang dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas-fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro; promosi garam beriodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian tbl besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dan malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa. Kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 5.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

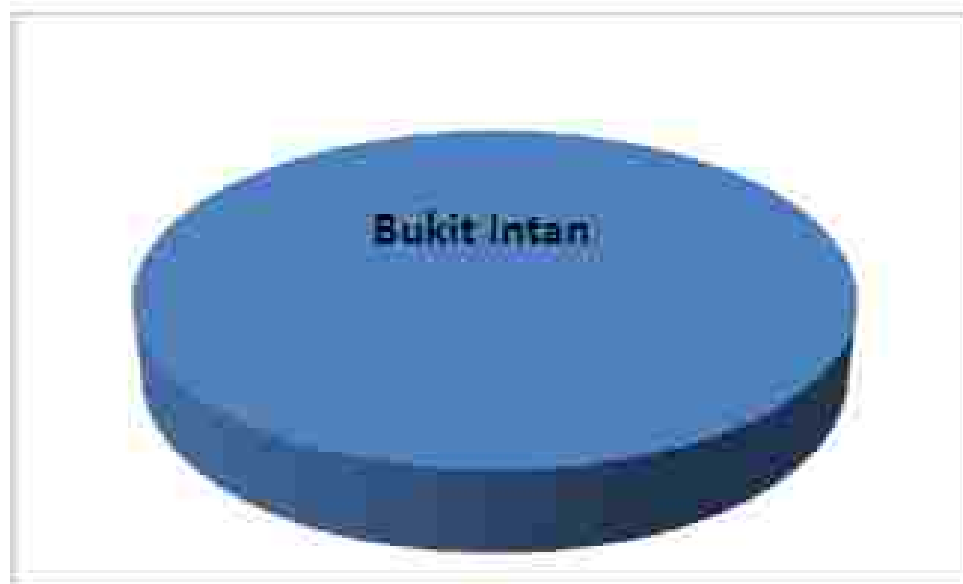
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang mengancam tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat risiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang maka didapatkan 1 kelurahan (Prioritas 2), 2 kelurahan (Prioritas 3), 16 kelurahan (Prioritas 4), 12 kelurahan (Prioritas 5) dan 11 kelurahan (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

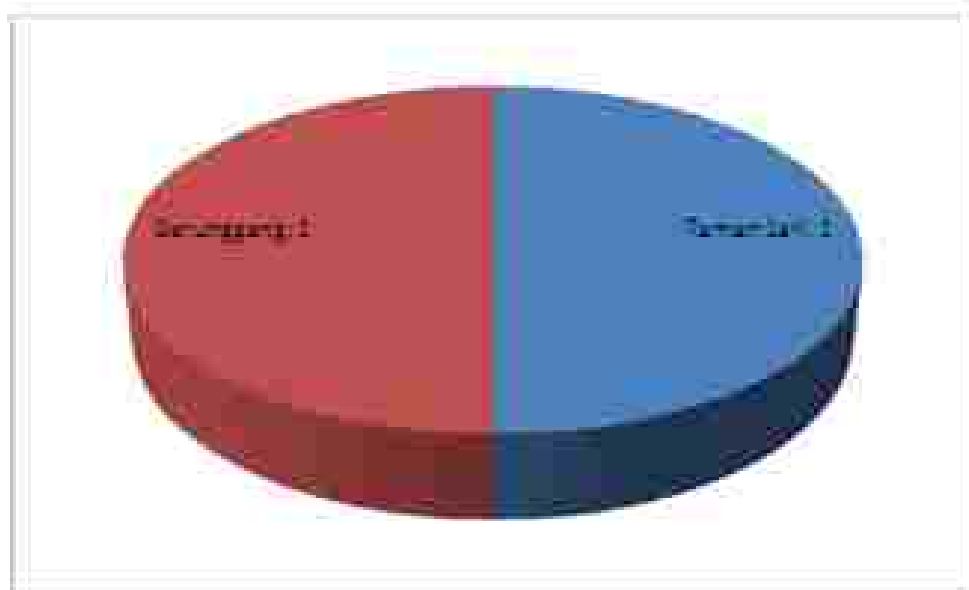
Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0	0
2	1	2,38%
3	2	4,76%
4	16	38,09%
5	12	28,57%
6	11	26,19%

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Bukit Intan (1 kelurahan) (Gambar 5.1):



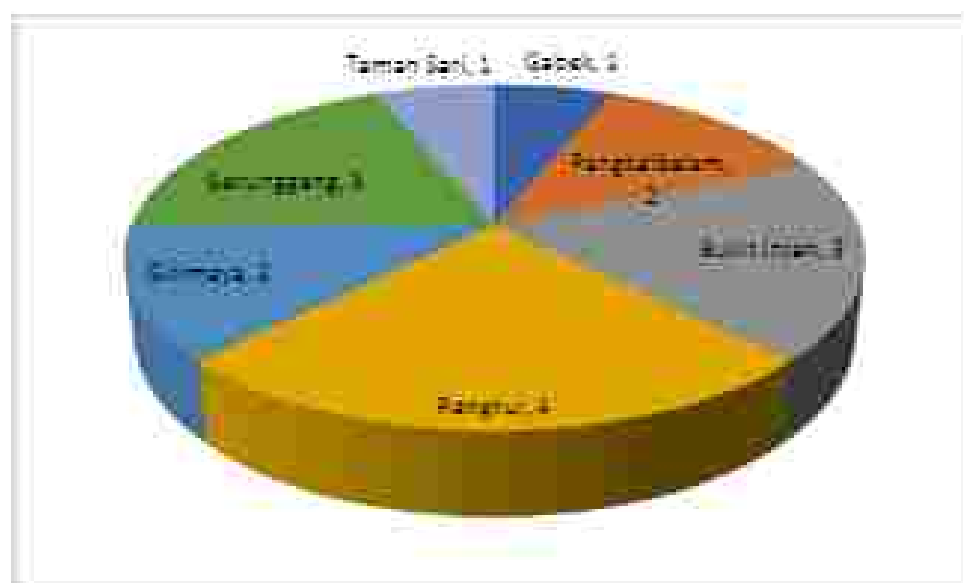
Gambar 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 2 Per Kecamatan

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Taman Sari (2 kelurahan) dan Kecamatan Gerunggang (1 kelurahan) (Gambar 5.2).



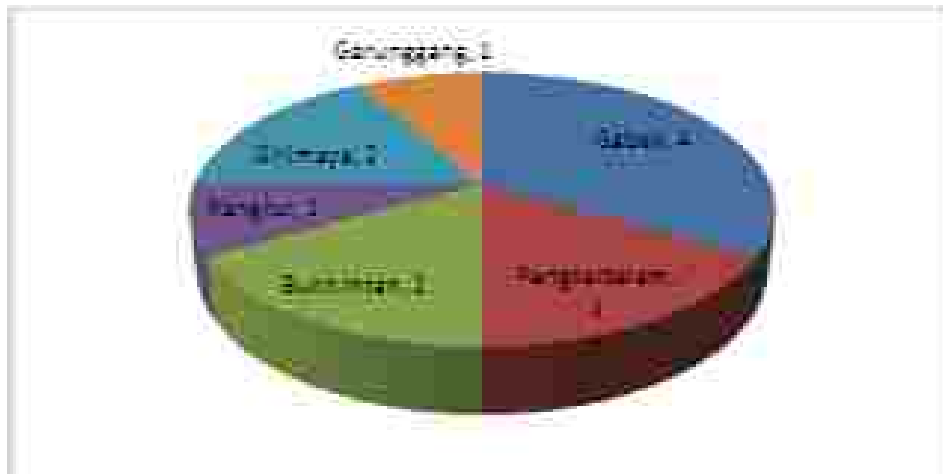
Gambar 5.2 : Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 3 per Kecamatan

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 4 terdapat di wilayah Kecamatan Rangkul (4 kelurahan), Kecamatan Girimaya (2 kelurahan), Kecamatan Pangkal Selam (2 kelurahan), Kecamatan Bukit Intan (3 kelurahan), Kecamatan Gerunggang (3 kelurahan) dan Kecamatan Taman Sari (1 kelurahan) dan Gabek (1 kelurahan) (Gambar 5.3).



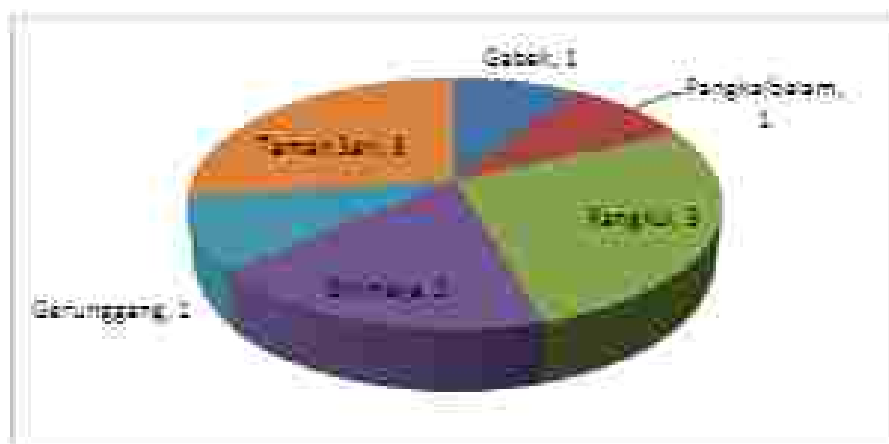
Gambar 5.3 : Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 4 Per Kecamatan

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 5 terdapat di wilayah Kecamatan Rangkul (1 kelurahan), Kecamatan Bukit Intan (2 kelurahan), Kecamatan Girimaya (2 kelurahan), Kecamatan Pangkal-Balam (2 kelurahan), Kecamatan Gabek (4 kelurahan) dan Kecamatan Gerunggang (1 kelurahan) (Gambar 5.4).



Gambar 5.4 : Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 5 Per Kecamatan.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 6 terdapat di wilayah Kecamatan Rangkul (3 kelurahan), Kecamatan Pangkal-balam (1 kelurahan), Kecamatan Girimaya (2 kelurahan), Kecamatan Gabek (1 kelurahan), Kecamatan Tamian Sari (3 kelurahan) dan Kecamatan Gerunggang (1 kelurahan) (Gambar 5.5).



Gambar 5.5 : Sebaran Jumlah Kelurahan Prioritas 6 Per Kecamatan.

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh : (1) Sarana Prasarana Penyedia Pangan, (2) Air Bersih, dan (3) Jumlah Tenaga Kesehatan.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh : (1) Sarana Prasarana Penyedia Pangan, dan (2) Tenaga Kesehatan.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh : (1) Tersedianya air bersih, dan (2) Tenaga Kesehatan.

BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah Kota Pangkalpinang diprioritaskan pada:

- Kelurahan-kelurahan prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Taman seri,
- Kelurahan-kelurahan pemukiman yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SOMnya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Penambahan sarana dan prasarana penyedia pangan.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan.

LAMPIRAN



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN TAHUN 2022

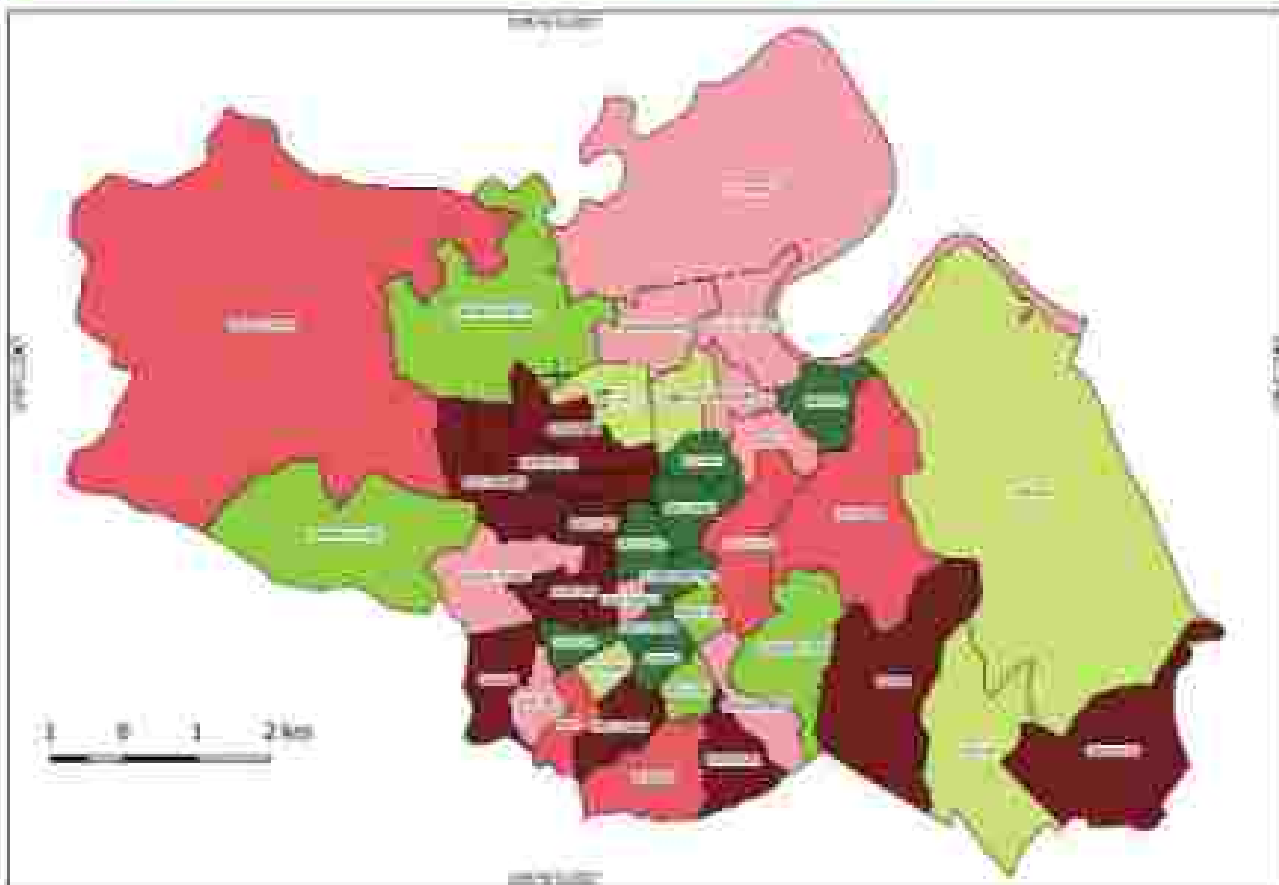


Legenda

- Sekolah Prinsipal 1
- Kecamatan Prinsipal 1
- Sekolah Prinsipal 2
- Kecamatan Prinsipal 2
- Sekolah Prinsipal 3
- Kecamatan Prinsipal 3
- Sekolah Prinsipal 4
- Kecamatan Prinsipal 4
- Sekolah Prinsipal 5
- Kecamatan Prinsipal 5
- Sekolah Prinsipal 6
- Kecamatan Prinsipal 6



DEMAS PANGAN
DARI PERDEHAAN
KOTA
PANGKALPINANG





PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH PENDUDUK TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH TAHUN 2022



Legenda

-  Rentanasi Wanita 1
-  Rentanasi Wanita 2
-  Rentanasi Wanita 3
-  Rentanasi Wanita 4
-  Rentanasi Wanita 5
-  Rentanasi Wanita 6



DINAS PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA
PANGKALPINANG

0 1 2 km



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO TANPA AKSES PENHUBUNG MEMADAI TAHUN 2022



Legenda

- 1. Ketahanan Pangan 1
- 2. Ketahanan Pangan 2
- 3. Ketahanan Pangan 3
- 4. Ketahanan Pangan 4
- 5. Ketahanan Pangan 5
- 6. Ketahanan Pangan 6

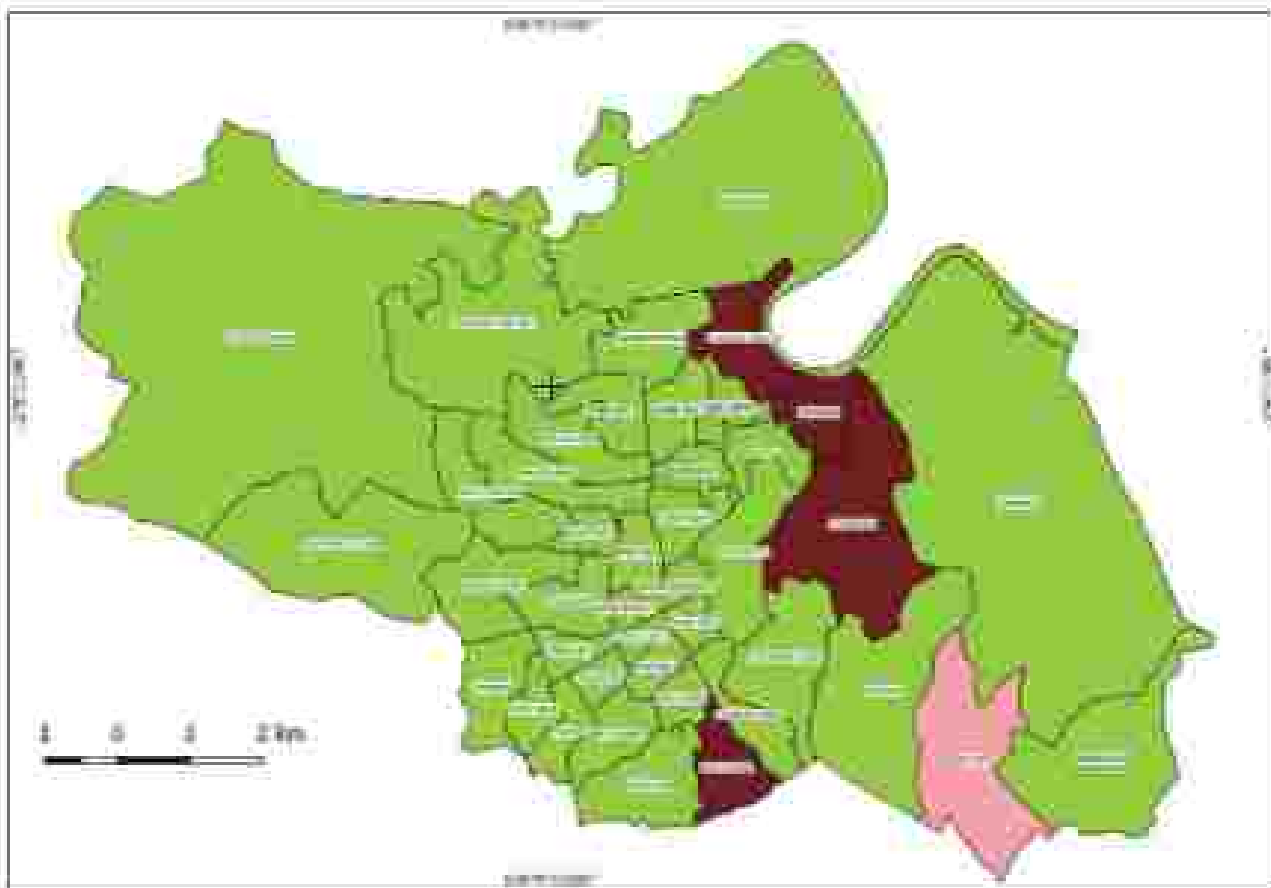


DINAS PERMUDA
DAN PERTANIAN
KOTA
PANGKALPINANG

0 1 2 km

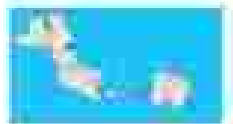


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN SUMBER AIR TIDAK TERLINDUNGI TAHUN 2022



Legenda

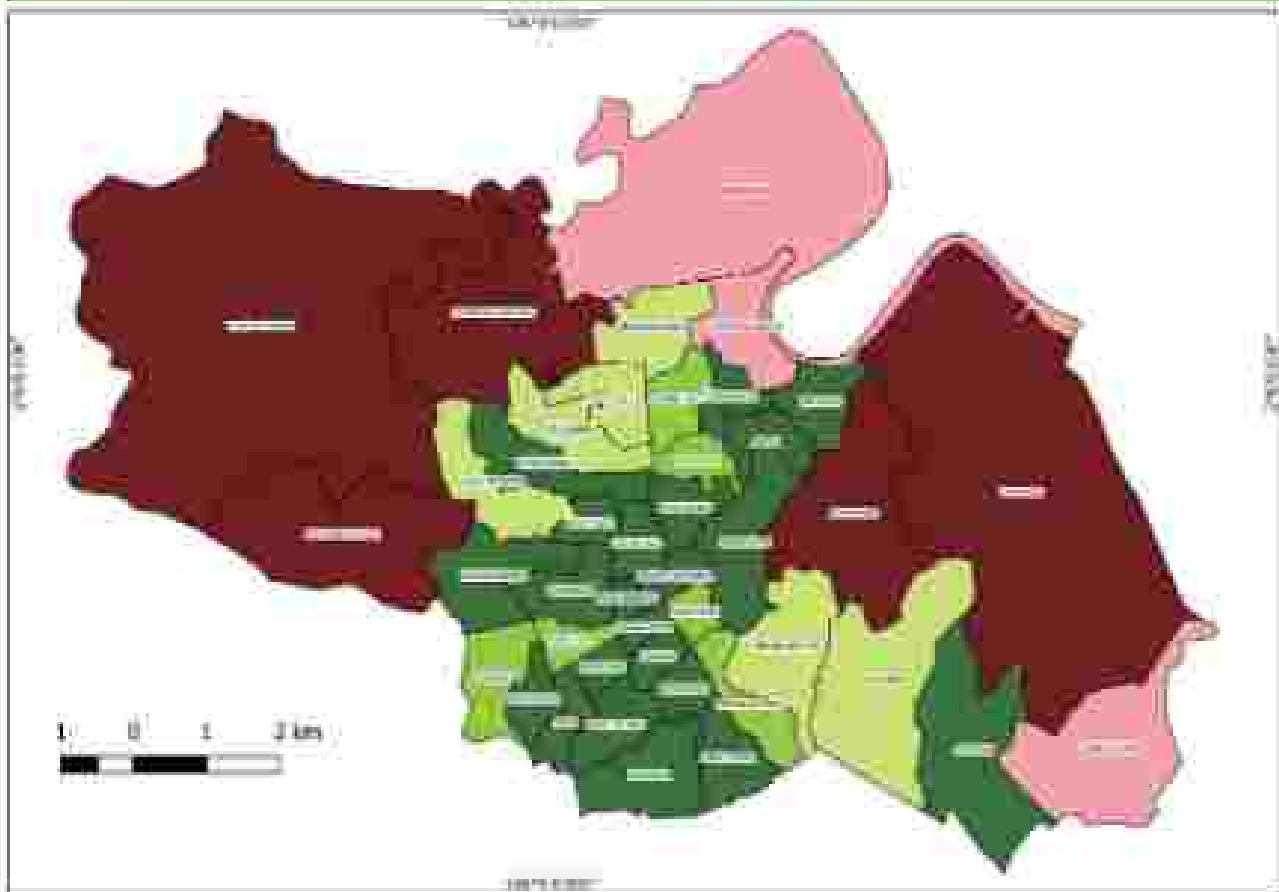
- Kawasan Prioritas 1
- Kawasan Prioritas 2
- Kawasan Prioritas 3
- Kawasan Prioritas 4
- Kawasan Prioritas 5
- Kawasan Prioritas 6



DAERAH PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA
PANGKALPINANG



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO JUMLAH TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022



Legenda

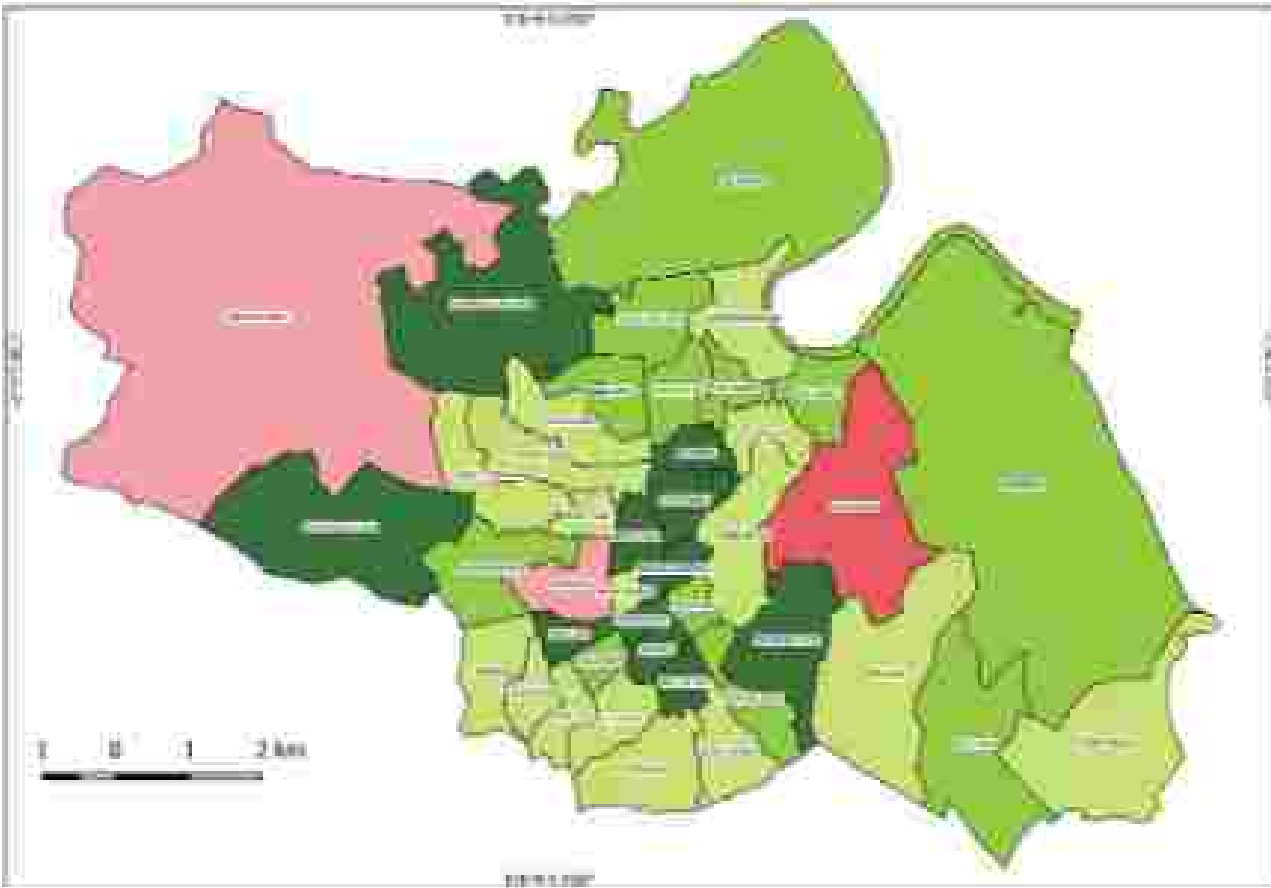
- Kategori Rentan 1
- Kategori Rentan 2
- Kategori Rentan 3
- Kategori Rentan 4
- Kategori Rentan 5
- Kategori Rentan 6



KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PIRYANAN
KOTA PANGKALPINANG



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA PANGKALPINANG RASIO SKOR KOMPOSIT TAHUN 2022



Legenda

- Kelurahan Perumahan 1
- Kelurahan Perumahan 2
- Kelurahan Perumahan 3
- Kelurahan Perumahan 4
- Kelurahan Perumahan 5
- Kelurahan Perumahan 6



DINAS PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA
PANGKALPINANG